DAFTAR PUSTAKA

Aholiab, Watloly. 2001. *Tanggung Jawab Pendidikan mempertimbangkan epistemology secara cultural* Yogyakarta: Kanisius.

Agustini, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hutabarat JM. 1984. *Ilmu Administrasi, Yogyakarta*: Liberty.

Syafiie IK. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Siagian SP. 2008. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soejono Soekanto. 1989. *Pengantar Penellitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin. 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta.

Saruundajang. 2012. *Pilkada Langsung Problemantika Dan Prospek,* Jakarta: Kasta Hasta Pustaka.

Topo Santoso. 2007. *Hukum Dan Proses Demokrasi*. Jakarta. Kemitraan. Sinar Grafika.

Miriam Budiarjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
Indonesia, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494)

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indondesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jurnal

Ridlwan, Zulkarnain. *Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat*, dalam: Jurnal Konstitusi , Vol III No. 1. Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah diakses pada tanggal 1 Desember 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung diakses pada 21 Desember 2012